

ABSTRAK

Haykal Mumtazul Hakim : Keterlibatan dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Peraturan Di Desa Cibuluh Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang Perspektif Siyasah Dusturiyah

Desa Cibuluh yang terletak di Kecamatan Tanjungsiang, Kabupaten Subang, merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan yang dimana keikutsertaan masyarakat dalam proses penyusunan peraturan desa merupakan elemen yang sangat penting untuk memastikan keputusan yang diambil berkaitan dengan peraturan melibatkan warga negara secara aktif.

Pembuatan Peraturan desa harus sejalan dengan perspektif siyasah dusturiyah agar dapat menerapkan nilai-nilai Islam dalam regulasinya, Perspektif siyasah dusturiyah sendiri memiliki peranan yang sangat penting untuk memahami bagaimana pemerintahan khususnya di tingkat desa mengakomodasi norma-norma dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam pembuatan peraturan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor penyebab kurangnya keikutsertaan BPD dan masyarakat dalam proses perancangan peraturan desa menurut UU No.6 tahun 2014 terkait desa di Desa Cibuluh Kec. Tanjungsiang Kab. Subang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dimana apakah BPD Desa Cibuluh sudah bekerja sebagaimana mestinya dalam membuat suatu peraturan yang saling menguntungkan, adil dan sesuai bagi kebutuhan masyarakat Desa Cibuluh, Kecamatan Tanjungsiang, Kabupateng Subang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Keikutsertaan masyarakat Desa Cibuluh dalam tahapan pembuatan aturan desa belum maksimal karena terdapat faktor penghambat seperti, kurangnya sumber daya manusia di lembaga BPD yang belum menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal dan beberapa anggota BPD yang belum memahami regulasi dalam pembentukan peraturan desa di Desa Cibuluh. 2) Usaha yang dijalankan pemerintah desa untuk memaksimalkan partisipasi masyarakat Cibuluh dalam tahapan perancangan peraturan desa dengan memperhatikan indikator keberhasilannya. 3) Usaha pemerintah desa dalam memaksimalkan partisipasi BPD dalam perancangan peraturan desa secara lembaga sudah sesuai dengan prinsip siyasah dusturiyah. Namun secara personal keanggotannya belum dilaksanakan secara maksimal. Tanggung jawab pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya perlu meningkatkan harmonisasi dengan BPD agar setiap perancangan peraturan desa tidak merugikan salah satu pihak.

Kata Kunci : *Siyasah Dusturiyah*, Peraturan Desa, BPD